

DAFTAR PUSTAKA

A. DAFTAR BUKU

- Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Bako, Ronny Sautma Hotma, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- De Kock, MH, 1954, *Central Banking*, Staples Press Limited, London.
- Djumhana, Muhamad, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fockema, Andrea, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kasmir, 1999, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Baru)*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2000, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Simorangkir, OP, *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suharto, Pandu, 1991, *Peranan dan Prospek Bank Perkreditan Rakyat*, Penerbit LPPI, Jakarta.

Sumardjono, Maria, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tri Susanto, Ruddy, 1996, *Kredit Usaha Perbankan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Widjanarto, 1995, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Penerbit Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank.

Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/12/PBI/2001 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/15/PBI/2001 tentang Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/Kep/Dir Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/54/Kep/Dir Tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat.